

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi (iii), 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik), Media Nusa Creative,

Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn, Pustaka Magister, Semarang.

HB Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Hukum PT. Grafindo, Surakarta.

Indra Apriadi, 2010, Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Neni dan Panji, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- 2011, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, yogyakarta,
- Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print Makassar.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Ayya Sofia Istifarrah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik", *Universitas Airlangga*, Vol. 3, Nomor 4 Juli 2020.
- Galih Akbar Prabowo, "Cyber Sex Sebagai Implikasi Perkembangan Teknologi Komunikasi" *journal of communication studies*, IAIN Ponorogo, Vol. 1, Nomor 02 Juli-Desember 2021.

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Makalah dalam Jurnal Quia Iustia, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Hwian Christianto, 2017, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember.

Jonathan David Erly Kilis, "tindak pidana terhadap publik figur yang memakai pakaian renang di tempat umum berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2008", *lex privatum*, vol. IX no. 13, desember 2021.

Kadek Martha Hadi Parwanta,"Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021,

L. Heru Sujamawardi 2018. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iuridic Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 9 Nomor 2 April 2018.

Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang, Vol. 19 No. 2, Mei 2021.

Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana", Fakultas Hukum Andalas, Vol 44 No. 4, Oktober 2015,

Sri Husnulwati,"Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna jasa Prostitusi Online", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Vol. 17, No. 2 Mei 2019.

Verawati R. Sushanty, "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi Elektronik", *Jurnal Gagasan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Vol. 1, No. 1 juni 2019.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-aplikasi.html>
diakses pada tanggal 5 oktober 2022

<https://repository.atmaluhur.ac.id/bitstream/handle/123456789/489/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 5 oktober 2022

<https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/ototek> diakses pada tanggal 23 september 2021

<https://tirto.id/gaTD> “Dampak Positif dan Negatif Teknologi TIK bagi Kehidupan Manusia” diakses pada tanggal 3 Oktober 2022

Makmur Jaya, Penggunaan Teknologi dalam Komunikasi Organisasi di lingkungan Kampus STAIN Gajah Putih.

<https://www.kompasiana.com/reycintautamiputri/628a7fb71583475007619192/dampak-positif-dan-negatif-kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi> diakses pada tanggal 3 Oktober 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-lt4b86b6c16c7e4> diakses pada tanggal 3 oktober 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknonologi dan Komunikasi

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN. Srg

Surat Keputusan

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesua, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016.

Surat Edaran

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.